

	<b>KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI</b> <b>POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE</b> Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90 Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id	
	Dokumen : Standar Operasional Prosedur (SOP) Judul Dokumen : Usulan Rencana Kerjadan Anggaran Tahunan PNL Standar : Pembiayaan Pembelajaran Bagian : Subbag. Perencanaan dan Sistem Informasi	No. Dok : SOP/PNL/UPM-04/08-004 Revisi : 00 Tgl Eff : 21 Februari 2016 Jlh Hal : 4

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN PNL



Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
<b>Hj. Anisah, SE</b> Ketua Tim Penyusun	<b>Ir. Herri Mahyar, MT</b> Ketua Unit Penjaminan Mutu	<b>Munwar, ST., MT</b> Wakil Direktur I

	<b>KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI</b> <b>POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE</b> Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90 Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id	
	Dokumen : Standar Operasional Prosedur (SOP) Judul Dokumen : Usulan Rencana Kerjadan Anggaran Tahunan PNL Standar : Pembiayaan Pembelajaran Bagian : Subbag. Perencanaan dan Sistem Informasi	No. Dok : SOP/PNL/UPM-04/08-004 Revisi : 00 Tgl Eff : 21 Februari 2016 Jlh Hal : 4

## Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

1. Digunakan sebagai acuan bagi setiap unit perencanaan dalam menyusun rencana dan anggaran secara terpadu.
2. Meningkatkan keserasian dalam perencanaan dan penganggaran pendidikan setiap unit kerja pusat dan daerah.
3. Mewujudkan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang realistis dan akuntabel.
4. Menyeraskan pembagian peran tanggungjawab yang jelas antar unit kerja dalam lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.

## Definisi

Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Tingkat Perguruan Tinggi dengan merupakan pola perencanaan anggaran tahunan dengan pendekatan Renstra, dan Target Kinerja dan menghasilkan output Rencana Kerja Tahunan (RKT). Struktur RKT meliputi semua unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe (Direktur, Pembantu Direktur, Jurusan, Bagian, Subbagian, Program Studi, Kepala Laboratorium, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe). RKT menjadi salah satu dasar penilaian kinerja kegiatan (*Performance Based Planning*)

## Ruang Lingkup

SOP ini meliputi:

1. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam melakukan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Tingkat Perguruan Tinggi.
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Tingkat Perguruan Tinggi.

## Referensi

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP).



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90  
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/UPM-04/08-004
Judul Dokumen	: Usulan Rencana Kerjadan Anggaran Tahunan PNL	Revisi	: 00
Standar	: Pembiayaan Pembelajaran	Tgl Eff	: 21 Februari 2016
Bagian	: Subbag. Perencanaan dan Sistem Informasi	Jlh Hal	: 4

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL).
7. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP);
9. Perpres Nomor 65 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Dosen;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2007 tentang sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
11. Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
12. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
14. PMK 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

**Prosedure**

1. Direktur melalui Pembantu Direktur I dan Pudir II mendelegasikan tugas agar segera melaksanakan Raker ke Sub Bag PSI.
2. Sub Bagian PSI menyurati Jurusan dan unit kerja lainnya untuk memasukkan Draft Rencana Kerja Anggaran.
3. Jurusan/ Prodi dan kepala Laboratorium mengadakan Rapat dalam membuat usulan rencana program kegiatan dan anggaran.
4. Sub Bag PSI dan Tim SPI melakukan koordinasi, konsolidasi, dan sinkronisasi masukan draft rencana program kegiatan dan anggaran dari jurusan dan unit kerja lainnya.
5. Sub Bag PSI membuat jadwal pelaksanaan pembahasan draft usulan anggaran secara interen dengan jurusan dan unit kerja lainnya.
6. Sub Bag PSI dan Tim SPI melakukan pembahasan dan review masukan dari unit-unit kerja terhadap Rencana Kerja dan Anggaran yang diusulkan dengan unit-unit kerja dalam lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.
7. Jurusan-jurusan dan unit kerja lainnya melakukan revisi draft usulan untuk disampaikan pada saat finalisasi Raker Usulan Anggaran.
8. Sub Bag PSI membuat jadwal pelaksanaan Finalisasi Raker usulan anggaran dengan jurusan dan unit kerja lainnya.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90  
 Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/UPM-04/08-004
Judul Dokumen	: Usulan Rencana Kerjadan Anggaran Tahunan PNL	Revisi	: 00
Standar	: Pembiayaan Pembelajaran	Tgl Eff	: 21 Februari 2016
Bagian	: Subbag. Perencanaan dan Sistem Informasi	Jlh Hal	: 4

9. Sub Bag PSI dan Tim SPI menyampaikan hasil review masukan dan data pendukung untuk membuat draft rencana program kegiatan dan anggaran Politeknik Negeri Lhokseumawe.
10. Hasil review oleh Sub Bag PSI dan Tim PSI menjadi rujukan yang akan disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Bersama Dirjen pendidikan tinggi dan sebagai Draft dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL).

**Bagan Alur Prosedur**

